

REKONSTRUKSI DAN REVITALISASI KOALISI DALAM SISTEM QUASI PRESIDENSIAL

Oleh : A. Bakir Ihsan

Abstract

Coalition is not merely a power sharing. Coalition requires shared commitment from all parties to consistently run the consensus in governing the executive branch of government through solidity of political party in parliament. Therefore, coalition actually can be a pathway (to stability) for government in implementing the mutually approved policy. It also can be a consistent balancer in controlling government. As a matter of fact, Indonesian democratic lives, coalition is based on power distribution which symbolized with position as ministry in presidential cabinet and any others structural position in government. But the coalition is built without support of shared vision and mission. Due to limited interest, coalition would only work temporary. Coalition like that seems to become the market which merely contain unstable daily political transaction.

Pendahuluan

Koalisi menjadi pilihan tak terelakkan di tengah kehadiran beragam partai politik dan tidak adanya partai politik pemenang mayoritas di parlemen. Koalisi merupakan jalan sintesis yang menjembatani beragam kepentingan partai politik untuk bersama dalam membangun dan menjalankan pemerintahan. Pada tataran praksis, koalisi biasanya dijalankan dalam sistem parlementer yang pemerintahannya dibentuk melalui koalisi atau oleh pemenang mayoritas dalam pemilihan umum. Berbeda dengan sistem presidensial yang kepala pemerintahannya dipilih langsung oleh rakyat atau melalui perwakilan yang memiliki legitimasi dari proses kontestasi. Karena itu, koalisi bukanlah kemestian atau harga mati dalam sistem presidensial atau quasi-presidensial,¹ walaupun kepala pemerintahan tersebut diusung oleh partai politik minoritas di parlemen.

Koalisi dalam sistem presidensial atau quasi presidensial menjadi penting ketika parlemen memiliki ruang "intervensi" yang eksekutif terhadap kerja pemerintahan seperti yang terjadi di Indonesia. Pemerintah merasa perlu membangun koalisi yang bisa menstabilisasi dan memuluskan kebijakan dan kerja-kerja pemerintahan. Dalam rangka itulah, koalisi dibangun oleh pemerintah dengan pembagian kursi kekuasaan sebagai ikatan koalisi. Dan itulah yang tampak dalam proses demokrasi sejak era reformasi. Walaupun dalam perjalanannya koalisi mengalami beragam bentuk penekanan dalam pelaksanaannya, namun pemerintahan yang terbentuk sejak era reformasi tidak bisa dilepaskan dari koalisi partai. Koalisi menjadi pilihan paling mudah untuk merangkul beragam kepentingan. Dengan demikian, koalisi tersebut tidak serta-merta menjadi jalan lapang bagi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, bahkan bagi eksistensi Presiden yang diusung bersama sejak sebelum pemilu berlangsung.

Keragaman bentuk koalisi yang berlangsung sejak era reformasi tidak bisa dilepaskan dari sistem politik dan sistem kepartaian yang ada. Tulisan ini akan menelaah dinamika koalisi dan urgensi koalisi dalam sistem pemerintahan quasi-presidensial dan di tengah keragaman partai politik serta kemungkinan dampaknya bagi kelangsungan pemerintahan ke depan.

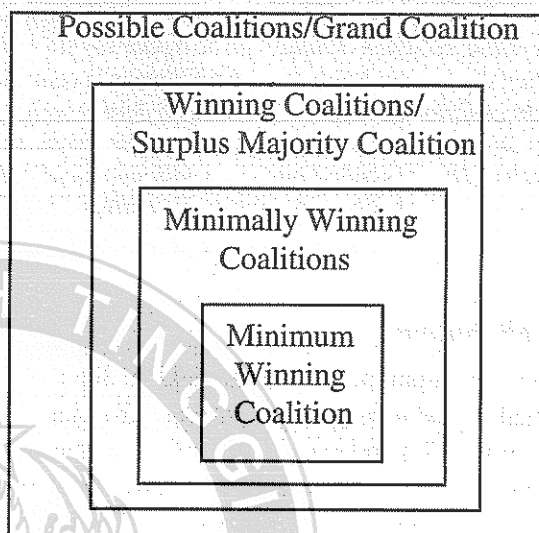
¹ Quasi presidensial di sini mengacu pada sistem presidensial yang masih menyisakan ruang "intervensi" oleh parlemen. Yaitu adanya kekuasaan presiden yang masih menjadi domain parlemen, seperti pengangkatan Panglima TNI, Kapolri, atau duta besar yang merupakan ranah kekuasaan presiden. Dalam hal ini DPR RI memiliki hak veto. Ruang "intervensi" parlemen ini dimungkinkan karena amandemen UUD 1945 dimotivasi oleh semangat antitesis terhadap UUD 1945 yang memberi ruang eksekutif bagi eksekutif (*executive heavy*) sehingga yang lahir dari hasil amandemen tersebut adalah *legislative heavy*. Baca; Edward Aspinall dan Marcus Mietzner (Ed.), *Problems of Democratisation in Indonesia, Elections, Institutions and Society*, (Singapore: ISEAS Publishing, 2010), hlm. 163.

Ragam Konsepsi Koalisi

Selama ini para pengamat memetakan koalisi dalam berbagai model yang dikaitkan dengan tujuan berkoalisi dan sistem politik yang ada. Tujuan koalisi menjadi pijakan yang akan menentukan bentuk maupun cakupan koalisi. Begitu juga sistem politik (demokrasi) yang dijalankan akan memengaruhi model koalisi yang dibentuknya. Secara garis besar koalisi dapat dipetakan dalam dua tipe. *Pertama*, koalisi yang dilatarbelakangi oleh kepentingan untuk meraih kemenangan di parlemen. Kemenangan ini menjadi penting karena politik lebih dimaknai sebagai kuantitas suara di parlemen yang akan menentukan kelangsungan pemerintahan (eksekutif). Koalisi ini sering disebut *minimum winning coalition*. *Kedua*, koalisi yang didasarkan pada kesamaan ideologi. Walaupun kemenangan tetap menjadi target, namun koalisi ini tetap berpijak pada kesamaan ideologi yang dianutnya. Koalisi ini biasanya disebut *minimum connected winning coalition*.²

Dari dua tipe koalisi tersebut terdapat varian-varian yang merupakan penjabaran lebih jauh dari substansi yang melatarbelakangi terjadinya koalisi. Di antara varian-varian tersebut adalah *minimum winning coalition*,³ yaitu sebuah koalisi pemenang minimal yang terdiri atas sejumlah partai peraih kursi terkecil dari semua koalisi pemenang minimal. Ada juga *minimally winning coalitions*,⁴ yaitu koalisi apapun yang berubah dari mayoritas ke koalisi minoritas karena pembelotan salah satu anggota. Dan koalisi ini bisa bubar bila salah satu anggotanya mengundurkan diri. Selain itu, ada *winning coalitions*, yaitu koalisi yang bisa

memperjuangkan inisiatif mitra koalisinya dan bisa memblokir atau menveto inisiatif saingannya. Ada juga *possible coalitions*, yaitu koalisi besar oleh beberapa partai (koalisi) pemenang. Setiap tipe tersebut dibedakan berdasarkan konteks area keterlibatan jumlah partai dalam koalisi dan pengaruhnya terhadap koalisi yang lain. Secara lebih gamblang Terrence E. Cook mengilustrasikan kisaran wilayah keempat tipe koalisi tersebut sebagai berikut.⁵



Gambar 1. Cakupan Koalisi

Dalam bahasa yang berbeda Munroe Eagles menempatkan *winning coalition* sebagai *surplus majority coalition* dan *possible coalition* sebagaimana Arend Lijphart menyebutnya sebagai *grand coalition*.⁶ Kedua tipe ini menunjukkan adanya perbedaan pada ranah cakupan koalisi yang dibangun oleh partai politik. Selain cakupan jumlah koalisi, Eagles dan kawan-kawannya menambahkan koalisi yang didasarkan pada kesamaan ideologi sebagai bagian penting

² Pemetaan model koalisi oleh sebagian kalangan dikaitkan dengan model demokrasi. Arend Lijphart misalnya menempatkan koalisi sebagai kemestian dalam demokrasi konsensus (*consensus model of democracy*) karena tidak adanya satu partai dominan. Arend Lijphart, *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, (New Haven: Yale University Press, 1984), hlm. 33.

³ *A minimum winning coalition contains the smallest number of seats of all minimal winning coalitions*. Konsep ini digagas oleh William Riker (1962) sebagai penjabaran dari konsep *minimal winning coalitions* yang digagas oleh Von Neumann dan Morgenstern (1953). Baca; Dennis C Mueller, *Public Choice III*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hlm. 281.

⁴ Terrence E. Cook, *Nested Political Coalition: Nation, Regime, Program, Cabinet*, (USA: Greenwood Publishing Group Inc, 2002), hlm. 4.

⁵ *Ibid.*, hlm. 5. Data (bagan) diolah dengan memasukkan tipe-tipe koalisi yang ditulis Munroe Eagles, Christopher Holoman, Larry Johnston dalam bukunya, *The Institutions of Liberal Democratic States*, Canada: Broadview Press, Ltd. 2004, hlm. 57. Baca juga: Larry Johnston, *Politics, An Introduction to the Modern Democratic State*, (Canada: University of Toronto Press, 2009), hlm. 267.

⁶ *Grand coalition* dalam perspektif Arend Lijphart tidak sekadar gerombolan partai besar, tapi juga diikat oleh sebuah perjanjian yang mengikat secara komprehensif dan bersama menjalankan roda pemerintahan. Baca: Arend Lijphart, *The Politics of Accommodation: Pluralism and Democracy in The Netherlands*, Edisi II (Revisi), (California: University of California Press, 1975), hlm. 195

dalam pembentukan koalisi. Koalisi berdasarkan kesamaan ideologi dapat mengikat erat kerja sama di antara partai koalisi. Sebaliknya, kerengangan ideologi dapat memperlonggar ikatan atau kontrak politik di antara partai koalisi.⁷ Koalisi yang didasarkan pada kesamaan ideologi, yang oleh Eagles disebut sebagai *minimum connected winning coalition*, menjadi penting di tengah kecenderungan pragmatisme partai politik.⁸

Terdapat banyak faktor munculnya koalisi besar di antara partai politik. Secara sederhana faktor koalisi bisa diklasifikasi ke dalam lima faktor (teori).⁹ *Pertama*, koalisi karena persamaan ideologi. Menurut teori ini, koalisi yang didasarkan pada kesamaan ideologi akan lebih kuat dalam membentuk kerja sama dan dapat meretas atau mengurangi konflik kepentingan. Robert Axelrod berpendapat bahwa koalisi semacam ini digolongkan sebagai *minimum connected coalition theory*.

Kedua, koalisi karena adanya kepentingan partai besar untuk “menetralisasi” kepentingan ideologi ekstrem. Untuk itu, diperlukan daya tawar yang memungkinkan masing-masing anggota koalisi mengajukan agendanya. Inilah yang

⁷ Robert D. Cooter, *The Strategic Constitution*, (New Jersey: Princeton University Press, 2000), hlm. 74. Buku ini menjelaskan bahwa ideologi merupakan alat pijak bagi kuat tidaknya kerja sama dalam koalisi. *Ideological connection may increase the ability of parties to cooperate. Conversely, ideological distance may decrease the ability of parties to cooperate.*

⁸ Munroe Eagles, Christopher Holoman, Larry Johnston, *The Institutions of Liberal Democratic States*, (Canada: Broadview Press, Ltd. 2004), hlm. 57. Lebih rinci buku ini membagi koalisi dalam, pertama, *minimal winning coalition*, yaitu koalisi yang dibentuk dengan melibatkan banyak partai dengan tujuan untuk sekadar mengendalikannya mayoritas legislatif. Kedua, *minimum winning coalition*, koalisi yang dibentuk oleh partai untuk sekadar mencapai minimum suara mayoritas. Koalisi ini merupakan koalisi sederhana karena tujuan yang dicapai dan jumlah partai yang terlibat sedikit sehingga distribusi kekuasaan bisa lebih dimaksimalkan. Karena itu, pula koalisi ini mudah bubar ketika salah satu partai keluar. Ketiga, *minimum connected winning coalition*, yakni koalisi partai pemenang dengan partai kecil yang didasarkan pada kedekatan ideologis untuk memudahkan pembentukan pemerintahan. Keempat, *surplus majority coalition*, koalisi yang dibentuk oleh partai pemenang bersama dengan partai besar lainnya untuk mengontrol legislatif. Ini kebalikan dari *minimal winning coalition*. Kelima, *grand coalition*, koalisi yang dibentuk dengan melibatkan lebih banyak partai di parlemen.

⁹ Craig Volden & Clifford J. Carrubba, “The Formation of Oversized Coalitions in Parliamentary Democracies,” *American Journal of Political Science*, Vol. 48, No. 3, Juli 2004, hlm. 522.

oleh Christophe Crombez disebutnya sebagai *proposal power theory*.

Ketiga, koalisi sebagai respons atas kebijakan *status quo* yang ekstrem. Koalisi ini dibentuk karena tidak adanya partai pemenang tunggal mayoritas sehingga memungkinkan terjadinya kesepakatan untuk membentuk pemerintah dan berbagi keuntungan, baik pada ranah jabatan maupun kebijakan, baik di eksekutif maupun di legislatif. David Baron dan Daniel Diermeier menyebutnya sebagai *status quo extremism theory*.

Keempat, koalisi karena adanya kebijakan balas jasa. Koalisi ini lebih didasarkan pada kepentingan pragmatis yang saling menguntungkan karena tidak adanya partai mayoritas. Koalisi ini sulit bertahan apabila tidak disertai oleh koalisi besar yang kuat karena masing-masing anggota koalisi mempunyai daya tawar tersendiri dan sewaktu-waktu bisa hengkang dari koalisi. Clifford J Carrubba dan Craig Volden menyebut koalisi seperti ini sebagai *logrolling theory*.

Kelima, koalisi karena mengamankan suara di parlemen. Karena itu, dibutuhkan koalisi besar (*grand coalition*) yang melibatkan partai besar. Menurut Arend Lijphart, sistem bikameral telah memberi peluang bagi munculnya koalisi besar di parlemen. Dan koalisi besar dibentuk untuk memastikan kontrol parlemen dalam sistem bikameral.

Kelima faktor koalisi tersebut memperlihatkan ragam kepentingan di balik pembentukan koalisi. Namun, secara umum koalisi bisa terjadi karena kepentingan pragmatis bisa juga karena pertimbangan ideologis dengan segala konsekuensinya, baik bagi dinamika di dalam parlemen maupun dampaknya bagi pemerintahan dan partai politik itu sendiri.

Secara faktual, praktik koalisi berlangsung cair dan melampaui batas-batas tipe koalisi yang dikonsepsikan para ahli. Hal ini sangat dimungkinkan terjadi karena adanya realitas sistem kepartaian yang tidak selalu berada dalam koridor kerangka teori sebagaimana dikonstruksikan dalam khazanah ilmu politik. Koalisi yang berlangsung sejak era reformasi memperlihatkan sebuah konstruk koalisi yang tak lazim dalam kategori tipe-tipe koalisi di atas. Dan hal tersebut berdampak atau berjaln kelindan dengan sistem

kekuasaan yang terbangun di atas koalisi yang tak lazim tersebut.

Dinamika Koalisi di Era Reformasi

Sejak pemilu pertama dilangsungkan di era reformasi, koalisi partai politik sebagai bentuk *power sharing* sudah terbentuk dengan segala dinamika kepentingannya.¹⁰ Pada Pemilu 1999 terbentuk koalisi Poros Tengah yang mengusung dan berhasil menempatkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan Amien Rais sebagai Ketua MPR RI. Koalisi “Poros Tengah” yang terdiri atas partai politik Islam ini menunjukkan ikatan berdasarkan kesamaan identitas.¹¹ Koalisi Poros Tengah terdiri atas partai politik Islam, yaitu PPP, PAN, PKB, PBB, PK, dan Partai Daulah Ummat yang merupakan gabungan dari partai-partai dengan kursi terkecil di DPR RI. Kemenangan Abdurrahman Wahid merupakan hasil dari soliditas koalisi dan ditambah oleh dukungan Partai Golkar, setelah kehilangan calon presiden yang diusungnya. Koalisi plus ini sejatinya menjadi kekuatan di parlemen untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang stabil. Apalagi dengan terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden, keanggotaan koalisi semakin meluas, bahkan nyaris tak tersisa sekaligus mengaburkan identitas politik. Hal ini terlihat dalam susunan kabinet pemerintahan Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputri yang melibatkan semua partai pendukung. Begitupun pada masa Megawati Soekarnoputri menjadi presiden,

keterlibatan banyak partai menjadi simbol koalisi besar (*grand coalition*) bagi pemerintahan.

Dalam perkembangannya, koalisi besar, baik pada pemerintahan Abdurrahman Wahid maupun Megawati Soekarnoputri tidak menunjukkan ikatan yang kuat sebagaimana layaknya koalisi. Koalisi hanya lebih terformat dalam bentuk distribusi kursi kekuasaan tanpa loyalitas pada visi dan misi bersama untuk membangun pemerintahan yang kuat dan solid. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa gejolak politik yang digerakkan oleh partai politik pendukung pemerintah.

Pada masa Abdurrahman Wahid, misalnya, terjadi penggunaan hak interpelasi yang berujung pada pelengserannya dari kursi kepresidenan. Ironisnya, pelengseran terhadap Abdurrahman Wahid didukung oleh partai dan tokoh yang mendukungnya sebagai Presiden. Pelengseran itu sendiri dikukuhkan oleh sidang MPR RI yang dipimpin oleh Ketua MPR RI, Amien Rais, yang notabene sebagai salah satu penyokong utama terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Bahkan Wakil Ketua MPR RI dari PKB, Matori Abdul Djalil yang juga Ketua Umum PKB juga ikut menghadiri sidang pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden yang secara tidak langsung mendukung terhadap pelengseran Abdurrahman Wahid.

Begitu juga pada periode Megawati Soekarnoputri, keterlibatan partai-partai besar dalam pemerintahan Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz tidak serta merta menjadi jalan aman bagi Megawati. Partai politik bersatu untuk menikmati kue kekuasaan dengan daya tawar yang bermacam-macam. Kekuatan daya tawar tersebut bisa dilihat dari komposisi kabinet gotong royong yang dibentuk Megawati yang tidak berkorelasi dengan perolehan kursi di parlemen. PAN yang perolehan kursinya berada di urutan kelima mendapatkan porsi jabatan di kabinet sama dengan PDIP. Kalau memakai teori balas jasa (*logrolling theory*), bisa jadi pemberian kursi kabinet tersebut karena jasa Amien Rais sebagai Ketua MPR RI yang memuluskan pergantian Abdurrahman Wahid kepada Megawati Soekarnoputri. Namun demikian, koalisi yang tercermin dari distribusi kekuasaan sebagai

¹⁰Koalisi sejatinya bukan sekadar *power sharing*. Namun bentuk paling formal dari koalisi adalah *power sharing*, yaitu pembagian kekuasaan, baik secara maksimal (plus) maupun minimal (minus) dalam satu bangunan kekuasaan. Baca; Sid Noel (Ed.), *From Power Sharing to Democracy*, (Canada: McGill-Queen's University Press, 2005), hlm. 86.

¹¹Poros tengah merupakan terminologi yang menggambarkan posisi partai-partai Islam yang berusaha memecah kebekuan politik yang terjadi antara PDIP yang mencalonkan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden dan Partai Golkar yang ingin mempertahankan BJ Habibie sebagai Presiden. PDIP dan Partai Golkar merupakan dua partai yang menempati urutan 1 dan 2 dalam perolehan suara pada Pemilu 1999. Poros tengah muncul sebagai alternatif dari tarik menarik kedua kekuatan tersebut. Partai yang bergabung dalam poros tengah ini tidak hanya partai politik yang berasaskan Islam, tapi juga partai politik yang berbasis Islam, tapi berasaskan Pancasila, seperti PAN dan PKB. Baca: Chris Manning & Peter van Diermen, *Indonesia di Tengah Transisi, Aspek-Aspek Sosial dari Reformasi dan Krisis*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm. 401.

Tabel 1. Perolehan Kursi Partai Politik di DPR RI & Koalisi Pemerintah pada Pemilu 1999

No	Nama Partai	Kursi 1999	462+38 %	Abdurrahman Wahid		Megawati Soekarnoputri
				I (33)	II (31)	(31)
1	PDIP	154	33,3	5	4	6
2	Golkar	120	26	5	4	4
3	PPP	59	11,6	2	1	3
4	PKB	51	10,2	5	6	1
5	PAN	35	6,8	5	4	6
6	PBB	13	2,6	1	1	1
7	PK/PKS	6	1,3	1	1	
8	PKP/PKPI	6	1,3			
9	PNU	3	0,6			
10	PDKB	3	0,6			
11	PBTI	3	0,6			
12	PDI/PPDI	2	0,4			
13	Partai politik lain**	7	1,4			
14	TNI			5	4	4
15	Profesional			4	6	6

Diolah dari data KPU, Center for Electoral Reform (Cetro), dan Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel*, (Jakarta: KPG-LSI,2009).

*Partai politik lain adalah partai politik yang hanya mendapatkan 1 kursi di DPR RI, yaitu Partai Persatuan, Partai Daulat Rakyat (PDR), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), PNI Front Marhaenis, PNI Massa Marhaen, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kebangkitan Ummat (PKU)

bagian dari *power sharing* tidak mencerminkan substansi koalisi.

Penggunaan hak interpelasi terkait kasus lepasnya Sipadan dan Ligitan menjadi cermin tidak berfungsinya komunikasi di antara partai-partai penyokong pemerintah. Penggunaan hak interpelasi, apalagi hak angket, oleh DPR selalu ditengarai sebagai upaya penggulingan kekuasaan, paling tidak menjadi batu sandungan bagi eksistensi kekuasaan. Karena itu, penggunaan hak-hak DPR tidak jarang menjadi pemicu kerenggangan sekaligus ketegangan di dalam koalisi.

Pemilu 2004 juga menghasilkan koalisi beberapa partai politik besar dengan menempatkan beberapa kadernya dalam pemerintahan yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang untuk pertama kalinya dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama dalam sejarah Republik yang memilih langsung presiden dan wakil presiden. Kecuali PDIP dan beberapa partai lain, seperti PBR, partai-partai yang memperoleh kursi signifikan di DPR RI menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

Tidak jauh berbeda dengan model koalisi pada periode sebelumnya, pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Ju-

suf Kalla ini koalisi juga masih menjelma sebagai gerombolan partai politik yang berbagi (berebut) kue kekuasaan tanpa visi dan misi yang jelas sebagai sebuah koalisi. Mereka hanya bersatu secara temporal dalam merespons kasus-kasus tertentu yang dinilai bisa mengganggu terhadap jalannya pemerintahan. Dan itulah yang terjadi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. DPR pada periode ini juga menggunakan hak-haknya. Bahkan dalam kasus kenaikan BBM, DPR menggunakan hak angket yang belum pernah digunakan sebelumnya. Walaupun penggunaan hak angket ini gagal mengungkap substansi persoalan, namun hal tersebut menunjukkan sebuah problem koalisi dalam sistem quasi-presidensial. Koalisi, baik bagi pemerintah maupun partai (parlemen) hanya menjadi alat tawar (transaksi politik) yang jauh dari substansi koalisi itu sendiri.

Kerentanan soliditas koalisi dalam sistem quasi-presidensial juga ditandai oleh langkah perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap anggota kabinet dari partai koalisi. Dua kali perombakan kabinet selama 2004–2009 menunjukkan adanya problem dalam pengelolaan pemerintahan yang ditopang oleh koalisi partai politik. Hal ini terlihat

Tabel 2. Perolehan Kursi Partai Politik di DPR RI & Koalisi Pemerintah pada Pemilu 2004

No	Nama Partai	Kursi 2004	550 %	Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla		
				I (36)	II ^{***}	III ^{****}
1	Golkar	128	23,27	2	3	4
2	PDIP	109	19,82			
3	PPP	58	10,55	2	2	2
4	Demokrat	55	10,00	2	2	2
5	PAN	53	9,64	2	2	2
6	PKB	52	9,45	2	2	2
7	PK/PKS	45	8,18	3	3	3
8	PBR	14	2,55			
9	PDS	13	2,36			
10	PBB	11	2,00	3	3	1
11	PPDK	4	0,73			
12	Partai Pelopor	3	0,55			
13	PKPB	2	0,36			
14	Partai politik lain*	3	0,54	2	2	2

Diolah dari data KPU, Center for Electoral Reform (Cetro), dan Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel*, (Jakarta: KPG-LSI,2009).

**Pergantian menteri pada *reshuffle* terbatas pertama (5 Desember 2005) meliputi: Menkoperekonomian, Aburizal Bakrie (Golkar) digantikan oleh Boediono (Profesional); Menkokesra, Alwi Shihab (PKB) digantikan oleh Aburizal Bakrie (Golkar); Menteri Perindustrian Andung Nitimihardja (Profesional) digantikan oleh Fahmi Idris (Golkar); Menakertrans, Fahmi Idris digantikan oleh Erman Suparno (PKB); Menteri PPP/Bapenas Sri Mulyani (Profesional) digantikan oleh Paskah Suzeta (Golkar); Menteri Keuangan, Yusuf Anwar (Profesional) digantikan oleh Sri Mulyani.

*** Pada *reshuffle* terbatas kedua (7 Mei 2007); Mensesneg, Yusril Ihza Mahendra (PBB) digantikan oleh Hatta Rajasa (PAN); Menkumham, Hamid Awaluddin (Profesional) digantikan oleh Andi Mattalata (Golkar); Menteri Perhubungan, Hatta Rajasa digantikan oleh Jusman Syafii Djamal (Profesional); Menkominfo, Sofyan Djalil (Profesional) digantikan oleh Muhammad Nuh (Profesional); Men-PDT, Saifullah Yusuf (PKB) digantikan oleh Muhammad Lukman Edy (PKB); Menteri BUMN, Soegiharto (Profesional) digantikan oleh Sofyan Djalil; Jaksa Agung, Abdul Rahman Saleh (PBB) digantikan oleh Hendarman Supandji (Profesional).

dari perombakan kabinet yang memperlihatkan pergeseran posisi menteri yang berasal dari kader partai tertentu ke kader partai lainnya atau bahkan reposisi terhadap kabinet yang berasal dari unsur profesional.¹² Nuansa (alasan) politik lebih kental mewarnai perombakan kabinet terbatas daripada evaluasi kinerja menteri secara komprehensif. Tarik menarik kepentingan politik di antara anggota partai koalisi menjadi pertimbangan yang lebih dominan dibandingkan dengan per-

timbangan yang terkait langsung dengan kinerja kabinet. Fakta ini menjadi preseden buruk bagi soliditas koalisi itu sendiri sekaligus menjadi hambatan bagi evaluasi obyektif terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Bermodalkan kemenangan satu putaran dalam pemilihan presiden 2009 dan didukung oleh kemenangan Partai Demokrat yang cukup signifikan di parlemen, Susilo Bambang Yudhoyono berusaha membangun koalisi melalui mekanisme yang lebih jelas dan mengikat secara prosedural. Paling tidak pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) sebagai wadah konsolidasi bagi partai koalisi menjadi bentuk yang lebih konkret akan adanya koalisi daripada periode sebelumnya. Pembentukan wadah koalisi yang

¹²Pergantian menteri dari unsur profesional ke kader partai bisa dilihat pada pergantian Menteri Perindustrian Andung Nitimihardja sebagai unsur profesional oleh Fahmi Idris sebagai kader Golkar pada *reshuffle* pertama. Pada *reshuffle* kedua pergantian Menkumham, Hamid Awaluddin sebagai unsur profesional oleh Andi Mattalata sebagai kader Golkar. Pada Tabel 2 terlihat adanya partai politik yang berkurang kadernya di kabinet, yaitu PBB, ada yang bertambah, yaitu Golkar.

Tabel 3. Perolehan Kursi Partai Politik di DPR RI & Koalisi Pemerintah pada Pemilu 2009

No	Nama Partai	Kursi 2009	560 %	Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono
				(34)
1	Demokrat	149	26,43	6
2	Golkar	106	19,2	3
3	PDIP	95	16,61	
4	PK/PKS	57	10,54	4
5	PAN	46	7,5	3
6	PPP	37	6,96	2
7	PKB	28	5,64	2
8	Gerindra	26	4,36	
9	Hanura	16	2,68	

Diolah dari data KPU dan Center for Electoral Reform (Cetro) dan *Kompas*, 21 Oktober 2009.

diikat dalam kontrak politik ini merupakan fenomena baru dalam konteks politik Indonesia dan dalam khazanah sistem pemerintahan presidensial maupun quasi-presidensial.

Koalisi besar ini hanya menyisakan tiga partai politik di parlemen, yaitu PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Hanura yang tidak terlibat dalam koalisi. Suara mayoritas di parlemen menjadi modal penting bagi stabilitas kerja pemerintahan. Namun, seperti koalisi sebelumnya, koalisi dengan modal yang sangat besar tersebut tidak terkonsolidasi secara efektif sehingga menjadi ganjalan tersendiri bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Pelaksanaan hak angket Century yang dimotori, di antaranya, oleh partai koalisi menjadi bukti longgarnya bangunan koalisi yang sangat besar tersebut. Koalisi yang kemudian “diinstitusionalisasi” menjadi Setgab gagal berfungsi layaknya sebuah koalisi yang memberi jalan lapang bagi kerja pemerintahan. Kepentingan politik partai anggota koalisi masih lebih mengemuka daripada komitmen untuk menjaga soliditas koalisi dan mendukung terhadap jalannya pemerintahan sebagaimana tertuang dalam kontrak politik yang ditandatangani oleh semua partai politik anggota koalisi. Bahkan koalisi menjelma menjadi ruang sandera untuk membuka peluang bagi transaksi politik yang melibatkan kepentingan partai politik.

Koalisi dalam sistem quasi-presidensial yang coba dibangun melalui kesepakatan bersama (kontrak politik) ternyata menyisakan problem baru. Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat

dengan dukungan suara yang signifikan, ternyata harus berhadapan dengan kepentingan partai politik di parlemen bahkan dengan partai anggota koalisi yang dibentuknya. Pembentukan wadah koalisi yang sebenarnya merupakan penunjang, bukan pokok, bagi stabilitas pemerintahan ternyata menjadi problem yang menyita konsentrasi kerja pemerintahan. Respons langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap sikap partai anggota koalisi yang bersuara berbeda dalam kasus mafia pajak menunjukkan ketergangguan presiden atas ketidakefektifan keberadaan dan peran koalisi.

Dinamika koalisi sejak era reformasi memperlihatkan sebuah fenomena transisi seiring proses demokrasi yang sedang mencari bentuk idealnya. Konsepsi koalisi belum sepenuhnya lazim, baik dalam sistem presidensial maupun quasi-presidensial, dorongan tak terelakkan untuk menggandeng (*inclusion*) maupun kerja sama (*cooperation*) partai politik yang beragam bagi stabilitas kerja pemerintahan, menjadikan koalisi sebagai sebuah keniscayaan. Karena itu, upaya membangun koalisi yang lebih solid, baik bagi kepentingan pemerintah maupun kekuatan penyeimbang di parlemen menjadi urgen. Paling tidak upaya yang dilakukan dalam pembentukan koalisi melalui Setgab pada pemerintahan kedua Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan upaya bagi terbentuknya sebuah koalisi yang lebih stabil sesuai dengan visi dan misi koalisi. Koalisi sejatinya tidak hanya menjadi domain partai penguasa, tapi juga di kalangan oposisi sehingga memiliki daya kontrol yang kuat bagi

kekuasaan. Dengan demikian, keberadaan koalisi tidak dikesankan sebagai upaya bagi-bagi kekuasaan semata, tapi merupakan kesungguhan untuk merawat sekaligus mengimplementasikan agenda-agenda kerakyatan dari pemerintah. Dengan demikian, masyarakat bisa melihat secara jelas kerja-kerja koalisi sebagai referensi pilihan politik pada pemilu berikutnya.

Secara formal-prosedural pembentukan Setgab atau sejenisnya sebagai “rumah koalisi” merupakan langkah awal bagi “institusionalisasi” koalisi. Hal ini menjadi modal awal dan penting karena koalisi memang membutuhkan sebuah “organisasi” yang bisa menggerakkan dan mengarahkan kerja-kerja partai anggota koalisi. Karena itu, peran kordinator atau ketua dari koalisi menjadi sangat penting untuk menjaga soliditas koalisi.¹³ Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah visi dan misi yang menggerakkan kerja koalisi sehingga output dari koalisi sesuai kontrak yang disepakati bersama.

Begitu juga partai politik yang berada di luar pemerintahan, sejatinya bisa membentuk koalisi sebagai penyeimbang yang kuat berhadapan dengan partai koalisi lainnya. Namun, dari pengalaman yang ada, partai politik, baik yang memilih untuk bergabung dengan pemerintah maupun yang memilih berada di luar koalisi (oposisi?), tidak memaksimalkan perannya sesuai dengan pilihan politiknya. Pragmatisme politik lebih mengemuka dibandingkan bersikap konsisten terhadap komitmen koalisinya. Inilah yang menyebabkan keberadaan koalisi menjadi kekuatan yang tidak menarik dan tidak diperhitungkan oleh berbagai kalangan. Partai politik lebih tergoda untuk memainkan dua kaki politiknya dengan harapan mendapatkan keuntungan berlipat. Inilah yang menyebabkan sistem pemerintahan quasi presidensial selalu “terancam” oleh manuver politik, bahkan oleh partai politik anggota koalisi.

“Ideologisasi” Koalisi

Dari perjalanan koalisi yang ada selama ini, problem koalisi merupakan bagian dari problem sistem politik kepartaian di satu sisi dan

¹³ Democrito T. Mendoza, *Kampanye Isu dan Cara Melobi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-Yayasan TIFA, 2004), hlm. 102.

problem internal partai politik di sisi yang lain. Partai politik kehilangan warna kompetisinya berdasarkan ideologi yang dianutnya karena lebih mengedepankan kepentingan pragmatis. Koalisi dibentuk tidak didasarkan pada sekadar menjadi mayoritas di parlemen sebagaimana *minimum winning coalition* atau karena kesamaan ideologis (*minimum connected winning coalition*), tapi menjadi cara mendapatkan jatah kursi kekuasaan semaksimal mungkin. Akibatnya partai politik lebih siap untuk bergerombol mencari keuntungan politik daripada bersaing (berkompetisi) dengan segala konsekuensinya sesuai ideologi partai. Dan hal tersebut akan terus terjadi tanpa adanya rekonstruksi sekaligus revitalisasi terhadap keberadaan koalisi di parlemen, baik koalisi bersama pemerintah maupun koalisi sebagai oposisi.

Problem sistem kepartaian saat ini tidak hanya terkait dengan pola dan perilaku interaksi di antara sejumlah partai politik yang labil, tapi juga inkonsistensinya pada ideologi yang dianutnya. Padahal sistem kepartaian, menurut Giovanni Sartori, ditentukan oleh ragam ideologi sebagai landasan bagi perilaku politik partai.¹⁴ Polarisasi partai politik berdasarkan jarak ideologi menjadi jalan bagi tumbuhnya kompetisi sebagai unsur penting dalam kontestasi dalam tubuh demokrasi.

Ada beberapa perspektif dalam menjelaskan masalah ideologi, yaitu ideologi sebagai pemikiran politik, ideologi sebagai kepercayaan dan norma, ideologi sebagai bahasa, simbol, dan mitos serta ideologi sebagai kekuasaan elite.¹⁵ Beberapa perspektif tentang ideologi tersebut memiliki benang merah sebagai kerangka dasar dalam mengoperasikan masing-masing ranah tersebut. Tujuan pengoperasian ideologi pada tingkat praksis tergantung pada kepentingan yang hendak dicapai. Secara garis besar, tujuan ideologi dioperasikan dalam tiga kategori: pertama, *status quo*, yaitu ideologi yang digunakan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik dalam segala situasi dan kondisi. Kedua, revolusioner atau radikal, yaitu ideologi yang

¹⁴ Giovanni Sartori, *Parties and Party Systems, A Framework for Analysis*, (UK: Cambridge University Press, 1976), hlm. 198.

¹⁵ Roger Eatwell dan Anthony Wright (Ed.), *Ideologi Politik Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2004), hlm. 3.

digunakan untuk mendorong adanya perubahan menyeluruh terhadap ekonomi, politik, dan sosial. *Ketiga*, reformis, yaitu ideologi yang dijadikan alat terjadinya perubahan secara gradual.¹⁶

Dari ketiga kategori tersebut, ideologi tetap memiliki satu dimensi yang menjadi benang merahnya, yaitu sebagai penggerak kepentingan bersama. Sebagaimana Roy C. Macridis menyebutkan:¹⁷ *Above all, ideology moves people into concerted action. Sometimes it moves a whole nation; sometimes it is a group, a class or a political party that unite behind certain principles to express their interests, demands, and beliefs.*

Dengan demikian, ideologisasi partai politik bisa berfungsi sebagai panduan komitmen partai politik sekaligus ikatan loyalitas para anggotanya bagi perwujudan visi dan misi yang dibawa oleh partai politik. Alasan pilihan ideologi masing-masing partai merupakan komitmen kolektif para pendirinya yang menjadi ruh dari gerak seluruh kader partai politik. Dengan demikian, ideologisasi partai dengan sendirinya akan mencegah terjadinya sikap menyimpang (deviasi) sebagian anggota partai dalam memperkuat loyalitas dan soliditas koalisi. Sikap menyimpang sebagian anggota partai koalisi dalam pengambilan keputusan menunjukkan longgarnya ikatan ideologis, baik pada kultural maupun struktural pada diri kader partai.

Penegasan dan konsistensi pada ideologi dalam jangka pendek mungkin “kurang menguntungkan” karena realitas budaya politik masyarakat yang masih mengambang dan cenderung homogen. Akan tetapi, ia secara perlahan memberi sumbangsih bagi terbangunnya kompetisi secara berkualitas dalam proses penguatan demokrasi dan memberikan ruang pilihan yang jelas bagi masyarakat dalam mempertaruhkan aspirasi politiknya. Terlebih seiring dengan arus modernisasi yang mendiferensiasi masyarakat ke dalam keragaman disiplin hidup, tawaran ideologi menjadi relevan dan urgen. Ketika partai politik dirasa kehilangan kekhasannya karena pragmatisme yang meminggirkan ideologi seperti saat ini maka ideologisasi bagi partai politik

menjadi pilihan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana dialami oleh beberapa partai agama di beberapa negara yang belakangan mulai mendapatkan tempat di hati masyarakat setelah partai politik sekuler dianggap gagal mengartikulasi kepentingannya.¹⁸

Berdasarkan asas atau ideologi, partai politik di Indonesia dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu partai nasionalis sekuler dan nasionalis agama. Partai nasionalis sekuler adalah semua partai politik yang mendasarkan dirinya pada nilai-nilai umum kebangsaan. Sementara partai nasionalis agama adalah partai yang memiliki keterkaitan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap agama. Partai nasionalis agama ini terbagi dua, ada yang ideologis atau dalam tipologi Larry Diamond dan Richard Gunther sebagai fundamentalis, dan ada yang berbasis agama atau denominasional.¹⁹

Sesuai dengan salah satu fungsi partai politik, kedua kategori partai sekuler dan agama tersebut sejatinya memiliki fungsi yang berbeda. Agregasi dan artikulasi kepentingan, termasuk dalam hal pilihan koalisi, seharusnya mengacu pada ideologi yang diaktualisasikan dalam kerangka kerja dan fungsi partai. Kalau merujuk pada kategorisasi Clifford Geertz dalam memetakan ranah sosiologis masyarakat Jawa,²⁰ maka partai sekuler memiliki wilayah cakupan konstituen yang lebih luas dibandingkan partai agama. Begitu juga dalam hal aspirasi, partai sekuler memilih ruang agregasi dan artikulasi aspirasi yang lebih luas. Hal ini terlihat dari agenda perjuangan yang dijalankan partai agama, dalam hal ini partai Islam pada Pemilu 1955 yang lebih fokus pada simbol-simbol keagamaan (keislaman).

¹⁸ Baca: Statis N. Kalyvas, *The Rise Of Christian Democracy in Europe*, (New York: Cornell University Press, 1996)

¹⁹ Larry Diamond dan Richard Gunther (Ed.), *Political Parties and Democracy*, (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2001), hlm. 9.

²⁰ Clifford Geertz memilah tiga kategori sosiologis, yaitu santri, abangan, dan priyayi maka secara kuantitas jumlah abangan dan priyayi masih lebih banyak dibandingkan kelompok santri. Istilah “santri” merupakan kategorisasi antropologis yang dipakai oleh Clifford Geertz sebagai pembeda dalam tingkat keislaman (keberagamaan) yang dianggap lebih taat dibandingkan kelompok abangan. Baca: Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981).

¹⁶ Roy C. Macridis, *Contemporary Political Ideologies, Movements and Regimes*, (Canada: Little, Brown & Company, 1983), hlm. 13.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 12.

Potensi “ideologisasi” partai politik di era reformasi sejatinya menjadi titik awal pengelompokan partai politik yang berdampak pada pilihan atau pembentukan koalisi. Hal ini sangat dimungkinkan karena undang-undang memberikan peluang bagi ideologisasi sekaligus aktualisasinya dalam dinamika kompetisi di antara partai politik. Dengan berpijak pada fungsi ideologi sebagai penjelas (*explanatory*), evaluasi, orientasi, dan fungsi-fungsi programatik politik,²¹ maka partai politik tidak sekadar memonumenkan ideologi dalam rangkaian kata dan kalimat yang tertera secara eksplisit di dalam AD/ART. Akan tetapi, juga menggerakkannya dalam agenda-agenda dan program partai secara praksis.

Pengabaian terhadap ideologi partai berdampak pada kaburnya agenda kepartaian bagi kepentingan rakyat, termasuk dalam penentuan koalisi. Deideologisasi partai politik telah berdampak pada matinya kompetisi dalam setiap kontestasi di alam demokrasi. Padahal kompetisi merupakan bagian yang sangat penting bagi tumbuhnya partisipasi politik masyarakat. Kontestasi berlangsung sebatas pada pertimbangan pragmatis yang lebih memungkinkan untuk meraih keuntungan politis tanpa mempedulikan tingkat relevansinya dengan ideologi yang dianutnya. Lebih dari itu, ideologi partai tidak jarang hanya dijadikan simbol untuk daya tawar berkoalisi dan mendapatkan kursi. Pada titik ini partai politik justru mendeviasi terhadap aspirasi yang masyarakat pertaruhkan pada partai politik dengan ideologi yang dianutnya.

Pilihan partai politik terhadap ideologi tertentu pada satu sisi bisa menyebabkan ruang gerak partai politik menjadi terbatas. Karena itu, dalam khazanah Ilmu Politik dikenal adanya upaya konvergensi antarideologi agar partai politik bisa tampil lebih leluasa. Dalam teori ekonomi demokrasi sebagaimana dinyatakan Anthony Downs, misalnya, konvergensi ideologi kiri dan kanan lebih membuka peluang bagi kemenangan partai politik.²² Ia bisa meraup lebih banyak

suara karena tidak terjebak dalam kubu tertentu dan memberikan peluang yang lebih luas bagi pilihan rasional para pemilih. Lebih jauh Jack Lively menjelaskan postulat yang ditawarkan oleh Anthony Downs;²³

As basic axioms, Downs postulates an electorate of rational voters and politicians whose aim either immediately or in the long run is the winning of elections. For the voter, the point of voting is to affect government policies in such a way as to benefit himself; for political parties (which Downs treats as homogeneous bodies), all actions are intended to maximize votes and policy decisions are merely means towards this end.

Kalau logika ini dipakai untuk menjelaskan partai politik yang meraih kemenangan di Indonesia di era reformasi, bisa dipahami bahwa kemenangan bisa diraih oleh partai politik yang menjadi tempat berlabuh semua kepentingan masyarakat. Yaitu partai politik yang tidak mengeksklusifkan diri pada ideologi spesifik yang justru memberi ruang sempit bagi aspirasi masyarakat yang heterogen. Namun, cara pandang ini tidak bisa menjelaskan semua fenomena politik di Indonesia karena secara faktual partai politik yang membuka diri (melakukan konvergensi) bagi semua kepentingan tidak selalu meraih kemenangan. Bahkan pada Pemilu 2009, PKS sebagai partai yang berideologikan Islam mampu meraih kursi di urutan keempat di atas sebagian partai politik lain yang berasas umum (Pancasila). Ini membuktikan bahwa ideologi partai yang bisa merangkul semuanya, atau dalam istilah Otto Kircheimer *catch-all party*,²⁴ ternyata tidak serta merta menjadi lebih unggul dibandingkan partai yang memiliki ideologi spesifik, seperti partai politik Islam. Bisa jadi konvergensi ideologi atau upaya partai

masyarakat yang mapan, homogen, konvergensi (titik temu) akan mudah terjadi, tapi dalam masyarakat yang terpolarisasi (heterogen), konvergensi sulit dilakukan.

²³ Jack Lively, *Democracy*, (Oxford: Basil Blackwell, 1975), hlm. 90.

²⁴ Larry Diamond & Richard Gunther (Ed.), *Political Parties and Democracy*, (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2001), hlm. 26. Diamond & Gunther menyebutkan beberapa partai politik yang memiliki tipe *catch all party*, yaitu Partai Demokrat di Amerika, Partai Buruh di Inggris di bawah Tony Blair, Partai Buruh Sosialis Spanyol, dan beberapa partai di Asia, seperti di Korea dan Taiwan.

²¹ Terence Ball dan Richard Dagger, *Political Ideologies and the Democratic Ideal*, (New York: Harper Collins Publishers, 1991), hlm. 8–9.

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 401. Dengan mengutip Rod Hague, buku Miriam Budiardjo menjelaskan perbedaan konvergensi dalam masyarakat yang mapan dan terpolarisasi. Dalam

politik untuk menempatkan diri ke garis tengah justru melahirkan ketidakjelasan pemihakan politik partai. Karena itu, ideologi tetap menjadi penting bagi partai politik, terlebih dalam sistem kepartaian yang banyak (*multiparty*). Begitu juga dalam pembentukan dan penguatan koalisi yang berdampak pada stabilisasi pemerintahan, ideologi menjadi urgen.

The stability of multi-party governments is itself highly variable, depending on several factors. One area of continuing interest and investigation is the kind of coalition formed, which has to do with the number of parties involved in government and their relationships to each other (ideology, relative strength) and to the rest of the legislature (size of majority, etc)... Second, stability depends greatly on the political culture, political practice, and institutional rules of individual nation-state.²⁵

Upaya penguatan koalisi tentu tidak cukup hanya dengan “ideologisasi” partai politik yang berdampak pada pilihan atau pembentukan koalisi. Peran partai politik bagi penguatan budaya politik masyarakat yang tercermin dalam praktik politik kader partai akan menjadi penguat bagi pilihan-pilihan partisipatif masyarakat terhadap partai politik. Karena itu, ideologisasi koalisi sebagai aktualisasi dari ideologisasi partai politik harus diimbangi oleh keseriusan dan konsistensi partai politik dalam pemberdayaan budaya politik masyarakat.

Menuju Konsistensi dan Kompetisi

Partai politik sebagai instrumen demokrasi memiliki beragam fungsi dan karenanya ia bergerak di antara beragam isu. Bahkan secara faktual, partai politik bisa berubah dari bentuk yang ideologis menjadi partai massa, dari partai yang mengedepankan isu-isu spesifik ke isu-isu yang serba mencakup. Perubahan ini memungkinkan karena adanya perubahan kecenderungan pemilih.²⁶ Lebih jauh, partai

²⁵ Munroe Eagles, Christopher Holoman, Larry Johnston, *The Institutions of Liberal Democratic States*, hlm. 58.

²⁶ Peter Mair, Wolfgang C. Muller, dan Fritz Plasser (Ed.), *Political Parties and Electoral Change*, (California: Sage Publications Ltd., 2004), hlm. 13. Dalam buku ini disebutkan: *More generally, and as with the targeting of groups of voters, parties may move between a more sectorally specific approach and a catch-all approach. Alternatively, parties which had*

politik bisa bermetamorfose dari partai elite ke partai massa, dari partai massa ke partai *catch all*, dari *catch-all party* ke partai kartel (*cartel party*). Kemungkinan metamorfose tersebut tergantung pada konteks sosial politik yang ada, baik pada ranah sosial maupun politik.

Namun demikian, metamorfose partai politik tersebut tidak bisa dilepaskan dari tiga aspek yang saling terkait. *Pertama*, motivasi dan landasan sikap partai. *Kedua*, program kerja partai. *Ketiga*, implementasi program kerja partai. Asas atau ideologi partai sebagai landasan sikap partai merupakan bagian penting dalam mendefinisikan dan memahami partai politik. Motivasi dan landasan tersebut menjadi akar dari program kerja dan proses implementasi program kerja partai.²⁷

Ideologisasi sebagai proses penguatan ideologi bagi kerja partai politik merupakan langkah penting untuk membangun kompetisi dalam sistem politik yang multipartai. Ketiadaan aktualisasi ideologi karena lebih mengedepankan pragmatisme politik berupa transaksi politik kekuasaan hanya memperdaya masyarakat dalam proses pembelajaran dan pemberdayaan politik warga. Bahkan pada titik tertentu, masyarakat akan sampai pada titik kejenuhan dalam menentukan pilihannya di antara deretan partai politik yang tidak jelas (kabur) jenis ideologinya.

Ideologi partai secara legalitas formal dapat dibaca dalam AD/ART masing-masing partai politik. Namun, upaya penguatan dan sosialisasi ideologi hanya bisa dilakukan melalui aktualisasi ideologi dalam sikap dan perilaku (kader) partai secara konsisten, baik pada ranah parlemen maupun ranah sosial, termasuk dalam penentuan maupun pembentukan koalisi di parlemen.

Perpecahan di dalam tubuh partai politik yang terjadi selama ini dan “liarnya” wacana yang digagas atau direspons oleh kader-kader partai politik, baik di parlemen maupun di eksekutif membuktikan tidak adanya ikatan

already transformed themselves into catch-all parties in the earlier postwar period may later come to believe that a catch-all strategy is no longer viable under the changed conditions of party competition.

²⁷ Moshe Maor, *Political Parties & Party System*, (London: Routledge, 1997), hlm. 3.

ideologi yang kuat pada diri partai. Inilah agenda mendesak yang harus dilakukan oleh partai politik untuk membentuk soliditas, kualitas, dan integritas kader-kadernya dalam menentukan pilihan politik bagi kepentingan masyarakat. Hal ini mendapatkan momentumnya saat ini karena partai yang berideologi umum (sekuler) sudah cenderung menguat pada partai-partai tertentu di satu sisi, sementara koalisi yang ada masih sangat longgar dan cair. Karena itu, kemungkinan rekonstruksi koalisi masih sangat terbuka di tengah longgarnya soliditas ideologi partai dan ikatan koalisi yang ada. Di antara partai politik yang ada masih terbuka mencari partner untuk berkoalisi, seperti PDIP atau partai lainnya yang tidak berkoalisi dengan pemerintah, tapi tidak juga berkoalisi untuk oposisi. Kondisi ini merupakan ruang bagi dimulainya penataan kembali terhadap model koalisi yang konsisten dan efektif sekaligus pemantapan ideologi sebagai bagian dari upaya revitalisasi koalisi.

Dinamika koalisi yang berlangsung selama ini bisa menjadi jalan masuk bagi rekonstruksi koalisi. Selain itu, juga sebagai upaya revitalisasi koalisi dalam sistem quasi-presidensial yang selama ini menjadi ajang transaksi politik karena masing-masing tersandera oleh kepentingan partai yang beragam. Dalam jangka panjang, rekonstruksi dan revitalisasi koalisi ini dapat mempercepat sekaligus memperkuat proses konsolidasi demokrasi dengan terbangunnya koalisi yang didasarkan pada kesamaan ideologi (*minimum connected winning coalition*) maupun pertimbangan kontrol yang kuat dan solid di parlemen (*minimum winning coalition*). Dengan demikian, partai politik telah menyicil kepastian tentang daya guna koalisi dalam sistem quasi-presidensial bagi kepentingan bangsa dan negara. Semoga.

Daftar Pustaka

Ambardi, Kuskritho. 2009. *Mengungkap Politik Kartel*. Jakarta: KPG-LSI.

Aspinall, Edward, dan Marcus Mietzner (Ed.). 2010. *Problems of Democratisation in Indonesia, Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

Ball, Terence, dan Richard Dagger. 1991. *Political Ideologies and the Democratic Ideal*. New York: Harper Collins Publishers.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia.

Cook, Terrence E. 2002. *Nested Political Coalition: Nation, Regime, Program, Cabinet*. USA: Greenwood Publishing Group Inc.

Cooter, Robert D. 2000. *The Strategic Constitution*. New Jersey: Princeton University Press.

Diamond, Larry, & Richard Gunther (Ed.). 2001. *Political Parties and Democracy*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Eagles, Munroe, Christopher Holoman, dan Larry Johnston. 2004. *The Institutions of Liberal Democratic States*. Canada: Broadview Press, Ltd.

Eatwell, Roger, dan Anthony Wright (Ed). 2004. *Ideologi Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela.

Johnston, Larry. 2009. *Politics, An Introduction to the Modern Democratic State*. Canada: University of Toronto Press.

Katz, Richard S. dan William Crotty. 2006. *Handbook of Party Politics*. London: Sage Publications Ltd.

Lijphart, Arend. 1984. *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*. New Haven: Yale University Press.

Lijphart, Arend. 1975. *The Politics of Accommodation: Pluralism and Democracy in The Netherlands*, Edisi II (Revisi). California: University of California Press.

Lively, Jack. 1975. *Democracy*. Oxford: Basil Blackwell.

Macridis, Roy C. 1983. *Contemporary Political Ideologies, Movements and Regimes*. Canada: Little, Brown & Company.

Mair, Peter, Wolfgang C. Muller, dan Fritz Plasser (Ed.). 2004. *Political Parties and Electoral Change*. California: Sage Publications Ltd.

Manning, Chris, & Peter van Diermen. 2000. *Indonesia di Tengah Transisi, Aspek-Aspek Sosial dari Reformasi dan Krisis*. Yogyakarta: LKIS.

Maor, Moshe. 1997. *Political Parties & Party System*. London: Routledge.

Mendoza, Democrito T. 2004. *Kampanye Isu dan Cara Melobi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-Yayasan TIFA.

Mueller, Dennis C. 2003. *Public Choice III*. Cambridge: Cambridge University Press.

Noel, Sid, (Ed.). 2005. *From Power Sharing to Democracy. Canada* McGill –Queen's University Press.

Sartori, Giovanni. 1976. *Parties and Party Systems, A Framework for Analysis*. UK: Cambridge University Press.

Segal, David R. 1974. *Society and Politics, Uniformity and Diversity in Modern Democracy*. Illinois: Scott, Foresman and Company.

Volden, Craig, & Clifford J. Carrubba. 2004. "The Formation of Oversized Coalitions in Parliamentary Democracies," *American Journal of Political Science*, Vol. 48, No. 3, Juli 2004.



